

SKRIPSI
PENGAWASAN TERHADAP PEMBUKAAN LAHAN PERKEBUNAN
OLEH MASYARAKAT SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KEBAKARAN
HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN MERANGIN PROVINSI JAMBI

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Di
Fakultas Hukum Universitas Andalas*

DISUSUN OLEH:

POPY DWI PUTRI
2210111046

Program Kekhususan: Hukum Agraria Dan Sumber Daya Alam (PK VIII)



Pembimbing:

Prof. Dr. Kurnia Warman, S.H., M.Hum
Dr. Syofiarti, S.H., M.Hum

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2026

No. Reg: 15/PK-VIII/III/2026

LEMBAR PENGESAHAN
VALIDITY SHEET
No.Reg: 15/PK VIII/III/2026

**PENGAWASAN TERHADAP PEMBUKAAN LAHAN PERKEBUNAN OLEH
MASYARAKAT SEBAGAI UAPAYA PENCEGAHAN KEBAKARAN
HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN MERANGIN PEROVINSI JAMBI**
***SUPERVISION OF PLANTATION LAND CLEARING BY THE COMMUNITY
AS AN EFFORT TO PREVENT FOREST AND LAND FIRES IN MERANGIN
REGENCY, JAMBI PROVINCE***

Disusun Oleh:
Author:

POPY DWI PUTRI
2210111046

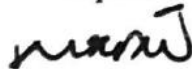
Program Kekhususan (PK): Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam (PK VIII)
Concentration Program (CP): Agrarian Law and Natural Resources (CP VIII)

Skripsi ini Telah Dipertahankan dalam Sidang Ujian Komprehensif pada Tanggal
10 Juni 2026 dan Dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji yang Terdiri Dari:
*This Minor Thesis was Defended in the Comprehensive Examination Session on June
10th, 2026 and Approved by a Team of Examiners Consisting of:*



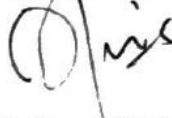
Prof. Dr. Ferdi, S.H., M.Hum.
NIP. 196807231993021001

Pembimbing I
Supervisor I



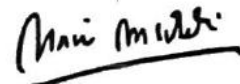
Prof. Dr. Kurnia Warman, S.H., M.Hum
NIP.197106301998021002

Penguji I
Examiner I



Prof. Dr. Khairani, S.H., M.Hum
NIP. 196212111989012001

Wakil Dekan I
Vice Dean I



Dr. Nani Mulyati, S.H., M.CL.
NIP. 198208092005012002

Pembimbing II
Supervisor II



Dr. Syofiarti, S.H., M.Hum
NIP. 197405181999032001

Penguji II
Examiner II



Dr. Titin Fatimah, S.H., M.H
NIP. 197406162002122001

	No. Alumni Universitas		Popy Dwi Putri		No. Alumni Fakultas
	a. Tempat/Tgl Lahir	: Mandiangin/01 April 2004	f. Tanggal Lulus	: 10 Juni 2026	
	b. Nama Orang Tua	: Syaiful Anwar (Alm) dan Andriani	g. Predikat Lulus	: Dengan Pujian	
	c. Fakultas	: Hukum	h. Lama Studi	: 3 Tahun 10 bulan	
	d. PK	: Hukum Agraria Dan Sumber Daya Alam	i. IPK	: 3,79	
	e. NIM	: 2210111046	j. Alamat	: Desa Sumber Agung, Kab. Merangin	

PENGAWASAN TERHADAP PEMBUKAAN LAHAN PERKEBUNAN OLEH MASYARAKAT SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN MERANGIN PROVINSI JAMBI

(Popy Dwi Putri, 2210111046, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Program Kekhususan Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam, 95 Halaman + xi Halaman, 2026)

ABSTRAK

Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) merupakan permasalahan lingkungan yang terus berulang di Indonesia, termasuk Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, akibat praktik pembukaan lahan dengan cara membakar yang bertentangan dengan Pasal 69 ayat (1) huruf h UU No. 32 Tahun 2009 dan Pasal 56 ayat (1) UU No. 39 Tahun 2014. Penelitian ini mengkaji pengaturan dan mekanisme pembukaan lahan perkebunan oleh masyarakat, pengawasan pemerintah, serta tindak lanjutnya sebagai upaya pencegahan Karhutla di Kabupaten Merangin. Menggunakan metode yuridis empiris deskriptif analitis, data diperoleh melalui wawancara dengan KPHP, Dinas Peternakan dan Perkebunan, DLH, BPBD, camat, dan kepala desa, serta dokumen hukum terkait. Hasil menunjukkan masyarakat umumnya membuka lahan milik sendiri yang dikuasai turun-temurun dengan metode bervariasi, namun kejadian Karhutla yang berulang mengindikasikan masih adanya aktivitas pembakaran. Persyaratan prosedural berupa pemberitahuan kepada kepala desa dan pemasangan sekat bakar tidak pernah dipenuhi, sebagaimana dikonfirmasi camat dan seluruh kepala desa yang diwawancarai. Pengawasan oleh KPHP, Dinas Perkebunan, DLH, dan BPBD berjalan terpisah tanpa koordinasi terpadu, menyebabkan celah pengawasan terutama di luar kawasan hutan, sementara tindak lanjutnya bersifat reaktif dan administratif melalui pendekatan persuasif yang belum terstandarisasi. Akibatnya, pada 2025 masih terjadi 12 kejadian Karhutla dengan luas terdampak sekitar 9,2 hektar. Kendala utama meliputi keterbatasan SDM, sarana prasarana, dan lemahnya koordinasi antarinstansi.

Kata Kunci: Pengawasan Pemerintah, Pembukaan Lahan Perkebunan, Kebakaran Hutan dan Lahan, Kabupaten Merangin.

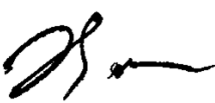
Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan lulus pada 10 Juni 2026.

Penguji,

Tanda Tangan	Penguji I	Penguji II
		
Popy Dwi Putri	Prof. Dr. Khairani, S.H., M.H	Dr. Titin Fatimah, S.H., M.H

Mengetahui,

Ketua Departemen Hukum Administrasi Negara: **Hendria Fithrina, S.H., M.H**



Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

	Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas	Nama:	Tanda Tangan:

	Alumni University Number	Popy Dwi Putri	Alumni Faculty Number
	a. Place/Date of Birth : Mandiangin/01 April 2004	f. Graduation Date : 10 th June 2026 g. Pass Predicate : With Honors h. Length of Study : 3 years 10 months i. GPA : 3,79 j. Address : Sumber Agung Village, Merangin Regency	
	b. Parents Name : Syaiful Anwar (Alm) dan Andriani		
	c. Faculty : Law		
	d. Concentration : Agrarian Law and Natural Resources		
	e. NIM : 2210111046		

SUPERVISION OF PLANTATION LAND CLEARING BY THE COMMUNITY AS AN EFFORT TO PREVENT FOREST AND LAND FIRES IN MERANGIN REGENCY, JAMBI PROVINCE

(Popy Dwi Putri, 2210111046, Faculty of Law, Andalas University, Speciality Program
Agrarian Law and Natural Resources, 95 Pages + xi Pages, 2026)

ABSTRACT

Forest and land fires (Karhutla) are a recurring environmental problem in Indonesia, including Merangin Regency, Jambi Province, due to the practice of land clearing by burning which is contrary to Article 69 paragraph (1) letter h of Law No. 32 of 2009 and Article 56 paragraph (1) of Law No. 39 of 2014. This study examines the regulation and mechanism of plantation land clearing by the community, government supervision, and its follow-up as an effort to prevent forest and land fires in Merangin Regency. Using an analytical descriptive empirical juridical method, data was obtained through interviews with KPHP, the Livestock and Plantation Service, DLH, BPBD, sub-district heads, and village heads, as well as related legal documents. The results show that people generally open their own land that has been controlled for generations by various methods, but repeated forest and land fires indicate that there are still burning activities. The procedural requirements in the form of notification to the village head and the installation of fire barriers have never been met, as confirmed by the sub-district head and all village heads interviewed. Supervision by the KPHP, the Plantation Service, DLH, and BPBD runs separately without integrated coordination, causing oversight gaps, especially outside forest areas, while the follow-up is reactive and administrative through a persuasive approach that has not been standardized. As a result, in 2025 there will still be 12 incidents of forest and land fires with an area of around 9.2 hectares. The main obstacles include limited human resources, infrastructure, and weak coordination between agencies.

Keywords: Government Supervision, Plantation Land Clearing, Forest and Land Fires, Merangin Regency.

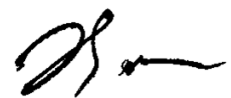
This Minor Thesis has been successfully defended and regarded to graduate at June 10th 2026

Examiner,

Signature	Examiner I	Examiner II
		
Popy Dwi Putri	Prof. Dr. Khairani, S.H., M.H	Dr. Titin Fatimah, S.H., M.H.

Acquainted,

Head of the Department of Administrative Law: **Hendria Fithrina, S.H., M.H.**



Signature

Alumni has been registered in the faculty/university under the number:

	Faculty/University Officer	
No. Alumni Faculty	Name:	Signature:
No. Alumni University	Name:	Signature: